

STRATEGI PEMERINTAH PUSAT DALAM PERTAHANAN NON MILITER DI DAERAH (STUDI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN PERTAHANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)

Muhammad Izzul Islamy¹, Muh. Jamal², Anwar Alaydrus³

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan memiliki luas teritorial yang sangat luas yang memiliki panjang garis pantai lebih dari 81.000 km serta 17.508 pulau dan luas sekitar 3,1 juta km². Banyaknya permasalahan pertahanan yang timbul di Indonesia menuntut pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tanggap dalam mengatasinya. Pertahanan negara adalah upaya mutlak yang harus dilakukan oleh suatu negara demi keberlangsungan hidup dan terjaganya kedaulatan dari segala ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam terhadap keutuhan bangsa dan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang dilakukan secara nasional untuk menjamin terdukungnya kepentingan nasional. Peran Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak dalam rangka penyiapan sumber daya nasional pertahanan, tidak saja mendukung penyiapan secara diri Hanmil namun juga mendukung kesiapsiagaan Hannirmil menghadapi berbagai bentuk ancaman yang nyata. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah strategi pemerintah pusat di daerah melalui Kantor Wilayah Kementerian Pertahan Provinsi Kalimantan Timur yaitu : Menyusun program kerja bersama yang terintegrasi, Broadcast Strategy (Strategi Penyiaran), Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Faktor penghambat dalam menjalankan strategi tersebut adalah masih banyak instansi di daerah khususnya Dinas PU di tiap kabupaten/kota yang belum mengetahui keberadaan dan tugas dari Kanwilhan Kaltim dan kurangnya sumber daya manusia yang tersedia.

Kata Kunci: *Strategi, pertahanan, negara, non militer.*

Pendahuluan

Indonesia memiliki sistem pertahanan negara yang dikenal dengan nama Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau disingkat Sishankamrata.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: izzul.islamy@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Suatu sistem yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total. Di sana terdapat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai komponen utama pertahanan dalam pertahanan jenis militer, sedangkan pertahanan nirmiliter atau non militer terdapat masyarakat sipil dan sumber daya nasional sebagai komponen cadangan sekaligus pendukung bagi pertahanan negara.

Penyelenggaraan pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang dilakukan secara nasional untuk menjamin terduduknya kepentingan nasional. Secara organisasi politik negara, Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas di atas, salah satu fungsi Kemhan adalah pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Dari sudut pandang pertahanan negara di daerah, Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengenai tugas Kemhan di daerah tersirat dalam Pasal 20 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan Hanneg. Pasal ini, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Kementerian Negara Pasal 4 ayat 2 (a), Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 1 (d), yang menyatakan bahwa Kemhan menyelenggarakan fungsi secara teknis dari pusat sampai ke daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kemhan menyelenggarakan fungsi teknis Hanneg dalam pembangunan daerah bersama dengan Pemda. Pada tahun 2018 melalui Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 21, Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan resmi menjadi lembaga vertikal organik di daerah dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 10 menyatakan bahwa Pertahanan adalah salah satu urusan pemerintahan absolut berdasarkan asas dekonsentrasi yang dapat dilaksanakan sendiri; dilimpahkan wewenangnya kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran Pemda sebagai ujung tombak dalam rangka penyiapan sumber daya nasional pertahanan, tidak saja mendukung penyiapan secara dini Hanmil namun juga mendukung kesiapsiagaan Hannirmil menghadapi berbagai bentuk ancaman nyata.

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah dituliskan, peneliti berkeinginan untuk lebih lanjut mengangkat judul penelitian ini agar mengetahui secara mendalam mengenai strategi pemerintah dalam menghadapi ancaman non militer di Provinsi Kalimantan Timur.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Strategi

Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan peperangan itu sendiri kelanjutan dari politik.

Thomson dalam Oliver (2007) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktifitas. Sementara itu strategi fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif.

Menurut Akdon (2011) pada dasarnya strategi adalah rencana berskala besar yang berorientasi pada jangka panjang yang jauh ke masa depan serta menetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang bersangkutan.

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internal organisasi. Organisasi melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk lembaga maupun pihak lain yang berada di bawah naungan lembaga.

Jenis Strategi

Wechsler dan Backoff dalam Heene (2010) menekankan bahwa terbuka peluang untuk mengidentifikasi hal-hal yang memungkinkan untuk mengkategorisasikan penerapan strategi organisasi publik ke dalam empat corak. Mengenai ciri-ciri spesifik dari keempat jenis strategi publik yang telah teridentifikasi oleh Wechsler dan Backoff dalam Heene (2010), dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Strategi Ekspansi

Di dalam strategi ekspansi penerapan strategi terutama sekali ditujukan bagi peningkatan status, kapasitas serta sarana-sarana yang berdampak mampu memberi sentuhan warna masa depan keorganisasian yang selaras zaman.

b. Strategi Transformasi

Pada strategi ini ditandai oleh adanya kebutuhan dari organisasi untuk memenuhi tekanan internal ataupun eksternal yang ada pada prinsipnya dilakukan demi terjadinya perubahan fundamental.

c. Strategi Isolasi

Strategi isolasi yang memiliki ciri adanya penolakan aktif terhadap tekanan eksternal yang tengah dihadapi oleh organisasi. Strategi ini berupaya untuk mengakomodasi tekanan eksternal dengan aspirasinya sendiri dengan catatan keinginan untuk tetap bisa mandiri secara organisasi dan senantiasa diprioritaskan.

d. Strategi Politisasi

Dalam strategi politisasi mengenal dua perwujudan. Pada perwujudan yang pertama, strategi organisasi ditujukan untuk menciptakan terbentuknya keseimbangan kekuatan yang baru di dalam organisasi tersebut. Sedangkan

perwujudan kedua ini paling negatif, organisasi publik tak lain hanya merupakan suatu instrumen partai politik.

Sistem Pertahanan Non Militer

Pengertian Sistem

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga dapat diartikan sebagai kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan serta mempunyai komponen-komponen penggerak, contohnya negara. Menurut Aristoteles, negara merupakan persekutuan dari pada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Sementara, kata pertahanan berasal dari kata dasar tahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tahan mempunyai arti keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal. Dengan pengertian tersebut, pertahanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang stabil.

Pengertian Pertahanan dan Keamanan Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan Negara merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Pertahanan negara dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai kekuatan pertahanan.

Tujuan Pertahanan Non Militer

Pertahanan non militer merupakan kekuatan yang dalam kerangka penangkalan dibangun dan dikembangkan untuk mencapai standar ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan teknologi. Ancaman non militer memiliki dimensi penanganan yang berbeda dengan pendekatan penanganan ancaman militer.

Dalam menghadapi kondisi negara menghadapi ancaman aktual berupa ancaman nirmiliter, sistem pertahanan negara disusun dalam lapis pertahanan nirmiliter sebagai unsur utama untuk mengambil langkah-langkah penanganan dengan pendekatan nirmiliter dengan memberdayakan instrumen ideologi, politik, ekonomi, psikologi, sosial budaya, informasi dan teknologi, serta hukum dan HAM. Inti pertahanan nirmiliter adalah pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh lapis pertahanan militer, tetapi pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi,

sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Pertahanan non militer diwujudkan dalam peran dan lingkup fungsi kementerian/lembaga pemerintah non departemen (LPND) di luar bidang pertahanan melalui penyelenggaraan pembangunan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam kerangka pertahanan berlapis, lapis pertahanan militer menyokong lapis pertahanan nirmiliter, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan isu atau ancaman militer guna mencapai hasil yang maksimal.

Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif dipergunakan dengan beberapa pertimbangan: pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif tarif menyusun desain yang secara terus menerus di sesuaikan dengan kenyataan dilapangan, tidak harus menggunakan desain yang telah di susun secara ketat atau kaku sehingga dapat di ubah lagi. Penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan yang berasal dari metode wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dan lain sebagainya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian kualitatif deskriptif yaitu peneliti menjelaskan fenomena yang terjadi dilapangan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan langsung, dokumentasi, dan lain sebagainya.

Adapun yang menjadi fokus penelitiannya yaitu:

1. Strategi Pemerintah Pusat Dalam Pertahanan Non Militer Di Daerah Kalimantan Timur meliputi:
 - a. Menyusun program kerja bersama yang terintegrasi.
 - b. *Broadcast strategy* (strategi penyiaran)
 - c. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat
2. Faktor penghambat dalam Strategi Pemerintah Pusat Dalam Pertahanan Non Militer Di Daerah khususnya di Kalimantan Timur

Hasil Penelitian

Strategi Pemerintah Pusat Dalam Pertahanan Non Militer Di Kalimantan Timur

Menyusun Program Kerja Bersama yang Terintegrasi

Seperti yang sudah kita ketahui, setiap pemerintah daerah baik tingkat provinsi hingga kabupaten/kota memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah. TNI dalam hal ini Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan juga memiliki perencanaan tersendiri dengan nama Tata Ruang Wilayah Pertahanan. Kedua belah pihak

memiliki kepentingan masing-masing sesuai tugas dan fungsinya di daerah, besar kemungkinan untuk saling bersinggungan.

Kanwilhan dalam hal ini adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Pertahanan, hadir di daerah salah satunya adalah sebagai fasilitator bagi pemerintah terkait dengan kepentingan pertahanan TNI. Menjembatani keduanya agar dihasilkan titik temu dalam perencanaan tata ruang wilayah sehingga pada akhirnya tidak ada kebijakan yang bertabrakan, kemudian menghasilkan kebijakan Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang sesuai serta tepat guna.

Selain itu Kanwilhan Kaltim juga berupaya menyusun program kerja sama dengan berbagai instansi negara dan badan pemerintah di daerah. Sebagai contoh, Kanwilhan Kaltim sudah membangun relasi dengan Dinas PUPR Kaltim, beberapa universitas, BNN Kaltim, dan Kesbangpol Kaltim/Kabupaten/Kota demi menyusun program pertahanan non militer yang berifat kolektif demi terwujudnya pertahanan non militer yang kokoh.

Program Kerja Sama Dengan Dinas PUPR Kaltim

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah salah satu mitra utama dari Kanwilhan Kaltim dalam bertugas di Provinsi. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, bagaimana membangun basis pertahanan negara memerlukan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Disokong dengan administrasi dan kebijakan yang tepat. Bukan hanya masyarakat dan daerah yang sejahtera karena mengelola lahan, pertahanan juga memerlukan tempat untuk membentuk sistem keamanan yang kokoh. Oleh karena itu, pembangunan keduanya harus beriringan, dan yang dapat memberi kesempatan tersebut adalah kebijakan dari pemerintah daerah dengan RTRW-nya.

Program Kerja Sama Dengan Universitas

Kanwilhan Kaltim dengan mengajak Perguruan Tinggi dalam penelitian potensi ancaman pertahanan non militer itu sudah tepat. Ini harus bersifat berkesinambungan karena Perguruan Tinggi memiliki sumber daya yang memadai untuk membantu Kanwilhan Kaltim ketika membutuhkan saran ilmiah.

Program Kerja Sama Dengan BNNP Kaltim

Langkah yang diambil oleh Kanwilhan Kaltim guna mencegah dan meminimalisasi kemungkinan ancaman pertahanan dari narkoba dengan mengajak BNNP sudah benar. Hanya saja pemberdayaan Duta Anti Narkoba masih belum ada kejelasan status. Ini bisa menjadi indikasi upaya Kanwilhan Kaltim membantu BNNP dalam pencegahan penggunaan dan penyebaran narkoba melalui kelompok kepemudaan bisa diragukan.

Program Kerja Sama Dengan Kesbangpol Kaltim dan Kabupaten/Kota

Kanwilhan Kaltim menjalin komunikasi secara intensif dengan Kesbangpol di daerah untuk bersama-sama merumuskan kebijakan teknis di kesatuan bangsa,

bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter, dan berbagi informasi mengenai perkembangan situasi terkini di tingkat provinsi mau pun kabupaten/kota.

Selain itu juga Kanwilhan Kaltim mengadakan seminar sosialisasi untuk lingkup Kesbangpol. Salah satu contohnya pada tanggal 6 Maret 2018, bertempat di Pendopo Odah Etam Tenggarong, bekerja sama dengan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai tuan rumah, mengadakan seminar dengan tema Sistem Pertahanan Semesta yang diikuti oleh seluruh perwakilan dari Kesbangpol kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Bagi penulis upaya Kanwilhan Kaltim untuk dapat terus tampil dan mengajak beberapa elemen di pemerintahan terutama Kesbangpol patut diapresiasi. Mengingat Kanwilhan Kaltim tidak akan mampu melaksanakan program pertahanan di daerah tanpa dukungan dari pihak-pihak pemerintah daerah setempat. Selain itu materi pada setiap seminar melalui pengamatan penulis secara langsung dinilai sudah cukup substantif dalam penyampaiannya.

Broadcast Strategy (Strategi Penyiaran)

Strategi penyiaran dapat diartikan penentuan rencana suatu proses menyiarkan acara siaran serta pengelolaan operasional yang meliputi segi kelembagaan dan sumber daya manusia, sehingga pendengar dan pemerhati dapat memahami apa yang disiarkan oleh penyiaran tersebut.

Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) peran media massa, sistem komunikasi, dan informasi publik dioptimalkan dalam mendukung implementasi kemampuan sosial untuk keberhasilan usaha-usaha pertahanan negara.

Media adalah mediator terbaik antara pemerintah dan masyarakatnya. Media berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam sebuah negara. Karena itu peran media massa termasuk media online menjadi sangat penting. (Mayor Pnb Kamto Edi Saputra, ST., *Peran Penting Media Dalam Pertahanan Negara*, <https://www.pontianakpost.co.id/peran-penting-media-dalam-pertahanan-negara>).

Kanwilhan dalam hal ini membuat akun di media sosial, contohnya seperti di Instagram dengan nama akun “@kanwilkemhan_kaltim”, selain media sosial kekinian tersebut sedang banyak diakses oleh masyarakat, juga untuk mengabarkan kepada publik apa saja agenda-agenda yang akan dan telah dilaksanakan oleh Kanwilhan Kaltim. Akun Instagram Kanwilhan Kaltim mulai aktif sejak tanggal 8 Agustus 2017 dan sepengetahuan penulis akun terkait selalu mengirimkan gambar aktivitas kegiatan Kanwilhan secara terkini. Kemudian Kanwilhan turut menjalin komunikasi kepada lembaga penyiaran milik negara dan mengajak mereka berpartisipasi dalam menyiarkan setiap program kerja Kanwilha.

Dapat penulis simpulkan bahwa mengacu pada peran media penyiaran sebagai jembatan pemerintah dengan masyarakat, Kanwilhan Kaltim sudah cukup

baik dalam pemanfaatannya. Terutama kesadaran akan pentingnya kehadiran media massa dalam aktivitas propaganda Kementerian Pertahanan.

Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya dengan cara menanamkan nilai-nilai. Maka dari itu Kanwilhan Kaltim dalam membangun Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, turut melibatkan masyarakat sebagai komponen non militer di dalamnya.

Pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental, diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berdasarkan kepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Pembangunan karakter bangsa dilakukan secara terintegrasi di semua Kementerian/Lembaga, Pemda, dan komponen bangsa lainnya. Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) diwujudkan untuk membentuk kader bela negara yang memiliki kesadaran dan kemampuan didasarkan pada nilai-nilai bela negara.

Menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) Pertahanan negara disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara dalam pertahanan negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diimplementasikan dalam wujud program bela negara atas dasar kecintaan terhadap Tanah Air. Program bela negara dicanangkan untuk kurun waktu 10 tahun ke depan akan mencapai 100 juta warga negara yang militan dan program ini akan terus dikembangkan seiring kebutuhan pertahanan negara.

Pembinaan kesadaran bela negara dilakukan untuk menanamkan sikap mental dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015)

Pembinaan kesadaran bela negara bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara sehingga setiap warga negara memiliki kesadaran dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara, demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kesadaran dan kemampuan bela negara dibutuhkan guna terbangunnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, baik dalam menghadapi ancaman militer, non militer maupun hibrida. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015)

Pembinaan kesadaran bela negara diarahkan untuk menangkal faham-faham, ideologi, dan budaya yang bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa

Indonesia. Bela negara dilakukan secara berkesinambungan melalui pendidikan dan latihan (Diklat) serta sosialisasi sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh terhadap ketersediaan sumber daya pertahanan. Pembinaan kesadaran bela negara dilaksanakan melalui lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman, dan lingkungan kerja. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015)

Berbagai cara dilakukan, di antaranya mengadakan Lomba Parade Cinta Tanah Air (PCTA) setiap tahunnya yang diikuti oleh siswa-siswi SMA sederajat dan mahasiswa-mahasiswi universitas sederajat dari seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Timur dengan tema tentang pengetahuan kewarganegaraan, pengetahuan kebangsaan dan kreatifitas. Pasca perlombaan, para peserta langsung diberdayakan dalam wadah kepemudaan yang bernama DPD Alumni PCTA Kaltim. Di sana mereka diberi kesempatan untuk belajar kepemimpinan, keorganisasian, bersosial dengan masyarakat, dan mendalami lebih jauh mengenai peran pemuda dalam menjaga kedaulatan.

Selanjutnya ada program Kader Bela Negara, yang mana program ini diikuti oleh beberapa lapisan masyarakat umum. Tidak dibatasi status sosial, jabatan, dan usia. Di sana mereka akan diberikan pembekalan berupa wawasan kebangsaan, kerukunan beragama, cara memberikan instruksi (CMI), cara berkomunikasi, pelatihan taktik dan teknik seperti navigasi darat, keterampilan tali temali, dan lain-lain. Tujuan diadakannya program ini adalah memupuk rasa nasionalisme dan siap siaga dalam menghadapi ancaman, baik militer mau pun non militer. Setelah program selesai, para Kader Bela Negara ini diberdayakan oleh Kanwilhan Kaltim dengan diikutsertakan dalam setiap agenda sosial budaya, sosial kemasyarakatan, dan turut menyosialisasikan kepada publik apa peran masyarakat dalam menjaga pertahanan negara.

Faktor penghambat dalam Strategi Pemerintah Pusat Dalam Pertahanan Non Militer di Daerah khususnya di Kalimantan Timur

Dalam melaksanakan strategi pertahanan non militer di Kalimantan Timur, tentunya menemukan berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan strategi tersebut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kanwilhan Kaltim dalam Seminar Pemberdayaan Wilayah Pertahanan pada tanggal 15 November 2017 lalu dan dikonfirmasi kembali pada pejabat Kanwilhan Kaltim bahwa permasalahan di tahun 2018 juga tidak jauh berbeda, sesungguhnya problematika yang menjadikan faktor penghambat strategi pertahanan non militer adalah sebagaimana berikut:

- a. Belum maksimalnya sinergitas antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya, dengan instansi vertikal serta dengan seluruh elemen masyarakat dalam menangani ancaman non militer.
- b. Belum adanya kesamaan persepsi dalam memandang ancaman non militer, ada yang memandang sebagai hal yang prioritas sekali dan ada pula instansi yang memberikan status biasa saja terhadap situasi yang terjadi.

- c. Karena belum adanya kesamaan persepsi tersebut, maka berakibat pada penyusunan program kerja yang belum terintegrasi satu dengan yang lainnya sehingga sering terjadi tumpang tindih program.
- d. Persoalan ego sektoral masih menjadi dinding pembatas belum optimalnya sinergitas.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a. Menyusun Program Kerja Bersama yang Terintegrasi
Yang utama adalah membantu TNI dari AD, AU, dan AL untuk dapat menyediakan mereka sarana dan pra sarana memadai yang sesuai peraturan daerah setempat dengan memfasilitasi pertemuan di setiap tahunnya bersama pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rapat kerja pembahasan tata ruang, dalam hal ini bersama Dinas PUPR Kaltim.
Kemudian menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Perguruan Tinggi di kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi pemberdayaan pertahanan kepada masyarakat akademisi dan penelitian berkaitan dengan penanggulangan ancaman non militer pada cakupan Provinsi Kalimantan Timur.
Selanjutnya juga bekerjasama dengan BNNP Kaltim dalam mencerdaskan masyarakat khususnya anak muda tentang bahaya narkoba. Beberapa di antaranya seperti membuat program pembentukan Duta Anti Narkoba, dan mengadakan seminar-seminar.
Berikutnya, Kanwilhan Kaltim bekerjasama dengan Kesbangpol provinsi dan daerah untuk bersama-sama merumuskan kebijakan teknis di kesatuan bangsa, bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter, dan berbagi informasi mengenai perkembangan situasi terkini di tingkat provinsi mau pun kabupaten/kota.
- b. *Broadcast Strategy* (Strategi Penyiaran)
Kanwilhan menjalin komunikasi kepada lembaga penyiaran milik negara seperti TVRI dan RRI, kemudian mengajak mereka berpartisipasi dalam menyiarkan setiap program kerja Kanwilhan. Selain itu, Kanwilhan Kaltim membuat akun di media sosial seperti *Instagram* guna menjangkau lebih luas lapisan masyarakat.
- c. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat
Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya dengan cara menanamkan nilai-nilai. Maka dari itu Kanwilhan Kaltim dalam membangun Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, turut melibatkan masyarakat sebagai komponen non militer di dalamnya.
Kanwilhan Kaltim membuat program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, di antaranya seperti mengadakan lomba Parade Cinta Tanah Air (PCTA) yang ditujukan kepada siswa SMA sederajat dan Perguruan Tinggi sederajat. Lomba tersebut bertemakan tentang pengetahuan kewarganegaraan,

pengetahuan kebangsaan dan kreatifitas. Pasca perlombaan, para peserta langsung diberdayakan dalam wadah kepemudaan yang bernama DPD Alumni PCTA Kaltim. Di sana mereka diberi kesempatan untuk belajar kepemimpinan, keorganisasian, bersosial dengan masyarakat, dan mendalami lebih jauh mengenai peran pemuda dalam menjaga kedaulatan.

Selanjutnya ada program Kader Bela Negara, yang mana program ini diikuti oleh beberapa lapisan masyarakat umum. Tidak dibatasi status sosial, jabatan, dan usia. Di sana mereka akan diberikan pembekalan berupa wawasan kebangsaan, kerukunan beragama, cara memberikan instruksi (CMI), cara berkomunikasi, pelatihan taktik dan teknik seperti navigasi darat, keterampilan tali temali, dan lain-lain. Tujuan diadakannya program ini adalah memupuk rasa nasionalisme dan siap siaga dalam menghadapi ancaman, baik militer mau pun non militer.

Faktor Penghambat

1. Telah disampaikan oleh Kanwilhan Kaltim dalam Seminar Pemberdayaan Wilayah Pertahanan pada tanggal 15 November 2017 lalu, masih banyak instansi di daerah khususnya Dinas PU di tiap kabupaten/kota yang belum mengetahui keberadaan dan tugas dari Kanwilhan Kaltim. Selain itu koordinasi yang masih kurang baik, keegoisan masing-masing, yang menjadikan mereka tidak menganggap bahwasannya membangun basis pertahanan dan keamanan adalah bagian dari prioritas utama.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi pertahanan non pertahanan milik Kanwilhan Kaltim adalah kurangnya tenaga sumber daya manusia yang tersedia. Idealnya minimal ada 17 orang yang ditugaskan di Kanwilhan Kaltim, tetapi yang tersedia baru 4 orang. Ini menyebabkan satu orang diharuskan mengerjakan tugas yang bukan bagian dari bidangnya.

Saran

1. Membuka seleksi penerimaan personel baru yang sesuai dengan kebutuhan. *Fresh Graduate* dari jurusan hukum, sosial, dan politik bisa dipertimbangkan. Paling cepat di semester ganjil tahun 2019/2020. Tugas-tugas besar dan berat dari Kanwilhan Kaltim membutuhkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dan tepat guna.
2. Jalin kerja sama intensif dengan dinas-dinas terkait yang selaras dengan kerja Kanwilhan Kaltim. Akomodir secara gencar keinginan TNI dalam menyampaikan keluhan dan saran kepada pemerintah daerah, demi terwujudnya sinergisitas yang baik.
3. Mendorong agar Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membuat Pergub yang mewajibkan seluruh dinas yang memiliki sangkut paut dengan pertahanan daerah agar bisa bersikap pro aktif ketika bekerja sama dengan Kanwilhan.
4. Terus menyosialisasikan program-program unggulan dari Kanwilhan kepada masyarakat khususnya anak-anak muda dengan memberdayakan DPD

Alumni PCTA dan Kader Bela Negara. Keduanya adalah aset berharga sebagai ujung tombak Kanwilhan di hadapan publik.

Daftar Pustaka

- Oliver, Sandra. 2007. *Strategi Public Relations*. Jakarta. Erlangga.
- von Clausewitz, Carl. 1812. *The most important principles of waging war to complete my course of instruction for his Royal Highness the Crown Prince*. Translated and edited by Hans W. Gatzke as "Principle of War", September 1942, The Military Service Publishing Company.
- Akdon. 2011. *Strategic Management For Education Management (Manajemen strategik untuk Manajemen Pendidikan)*. Bandung. Alfabeta
- Heene, Aime dkk, 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung. Refika Aditama.

Dokumen-Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169);